1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pengendalian inflasi daerah merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memantau perkembangan harga secara berkala, mengidentifikasi komoditas penyumbang perubahan harga, serta menyiapkan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi wilayah.

   Berdasarkan IPH yang dirilis oleh BPS Kabupaten Kepulauan Aru tercatat sebesar 0,43 pada akhir Juli, meningkat menjadi 0,72 pada Minggu II Agustus, kemudian turun menjadi 0,59 pada Minggu III dan 0,09 pada Minggu IV Agustus. Pada September, IPH tercatat sebesar 0,94 pada Minggu I, 0,84 pada Minggu II, dan 0,44 pada Minggu IV. Data Minggu I Agustus dan Minggu III September tidak karena belum dirilis oleh BPS.

Periode	Nilai IPH	Perubahan	Komoditas penyumbang yang tercatat
Akhir Juli 2026 (pembanding)	0,43	—	Bawang putih; gula pasir; bawang merah
Minggu I Agustus 2026	Tidak tersedia	—	Tidak dicantumkan dalam sumber
Minggu II Agustus 2026	0,72	+0,29 (+67,44%)	Cabai rawit; cabai merah; bawang merah
Minggu III Agustus 2026	0,59	-0,13 (-18,06%)	Cabai merah; cabai rawit; bawang merah
Minggu IV Agustus 2026	0,09	-0,50 (-84,75%)	Bawang merah; bawang putih
Minggu I September 2026	0,94	—	Daging ayam ras; cabai merah; cabai rawit

Minggu II September 2026	0,84	-0,10 dari Minggu I	Cabai rawit; daging ayam ras; cabai merah
Minggu III September 2026	Tidak tersedia	—	Tidak dicantumkan dalam sumber
Minggu IV September 2026	0,44	-0,40 dari Minggu II*	Cabai rawit; cabai merah; tepung terigu

Perbandingan pada minggu yang sama menunjukkan bahwa IPH Minggu II September sebesar 0,84 lebih tinggi 0,12 poin dibandingkan Minggu II Agustus sebesar 0,72 (sekitar 16,67%). Pada Minggu IV, IPH September sebesar 0,44 lebih tinggi 0,35 poin dibandingkan Minggu IV Agustus sebesar 0,09. Secara angka, IPH Minggu IV September sekitar 388,89% lebih tinggi daripada Minggu IV Agustus; persentase ini dipengaruhi nilai dasar Agustus yang rendah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penurunan IPH pada akhir Agustus tidak berlanjut pada tingkat yang sama di September.

Risiko ke Depan

- Terbatasnya pasokan cabai dan komoditas hortikultura akibat kondisi cuaca dan musim tanam.
- Ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari luar daerah, sehingga harga di tingkat konsumen dapat dipengaruhi oleh harga di daerah pemasok dan biaya transportasi.
- Gangguan atau keterlambatan distribusi melalui jalur laut yang dapat mengurangi ketersediaan barang di pasar.
- Peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu yang berpotensi menekan ketersediaan dan mendorong kenaikan harga.
- Fluktuasi harga komoditas pangan strategis yang memerlukan pemantauan dan koordinasi lintas perangkat daerah secara berkelanjutan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis. Pada Agustus, bawang merah tercatat sebagai komoditas penyumbang secara berulang, sedangkan cabai rawit dan cabai merah muncul pada Minggu II dan III. Pada September, cabai rawit dan cabai merah tercatat pada seluruh periode yang tersedia.
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketergantungan tersebut membuat ketersediaan dan harga dipengaruhi kondisi daerah pemasok, jadwal pengiriman, serta biaya distribusi.
3. Tingginya biaya distribusi dan hambatan transportasi. Sebagai wilayah kepulauan, kelancaran pasokan Kabupaten Kepulauan Aru sangat dipengaruhi transportasi laut dan kondisi cuaca.
4. Keterbatasan data harga dan stok yang terperinci. karena Kabupaten Kepulauan Aru masih bergantung pada pada lain

Perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pelaku usaha. Pertukaran data yang rutin diperlukan untuk mempercepat deteksi dini dan pelaksanaan intervensi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan melalui kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya yang dilaporkan mencakup pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, koordinasi distribusi melalui jalur laut, serta rapat evaluasi dan penyampaian informasi perkembangan harga.

Berdasarkan klarifikasi pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat kegiatan Operasi Pasar maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan selama periode Juli–September 2026. Kegiatan TPID yang dilaksanakan pada Triwulan III adalah rapat pembahasan Road Map dan Timeline Pengendalian Inflasi pada tanggal 24 September 2026.

Rapat penetapan Road Map dan Timeline Pengendalian Inflasi tanggal 24 September 2026 menjadi forum untuk menyepakati arah, tahapan, dan jadwal pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah.

TPID perlu kembali menjadwalkan dan mempersiapkan Operasi Pasar dan GPM pada periode berikutnya. Selain itu, Sidak Pasar perlu dilakukan secara berkala, terutama ketika pemantauan menunjukkan kenaikan IPH atau lonjakan harga pada komoditas tertentu.

TPID bersama perangkat daerah teknis perlu melakukan Sidak Pasar untuk memeriksa harga beli dan harga jual, stok yang tersedia, asal pasokan, frekuensi pasokan masuk, serta kemungkinan hambatan distribusi pada komoditas cabai rawit, tempe, dan telur ayam ras. Hasil pemeriksaan perlu dituangkan dalam berita acara atau laporan singkat yang memuat lokasi, pedagang/sumber informasi, harga, stok, temuan, dan rekomendasi. Apabila ditemukan kenaikan harga yang meluas, stok terbatas, atau gangguan pasokan, TPID perlu mengkoordinasikan langkah yang sesuai, termasuk Operasi Pasar dan/atau GPM, penguatan pasokan dari daerah lain, fasilitasi distribusi, serta komunikasi harga kepada masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan harga. Pemantauan perlu membandingkan harga eceran antar pasar dan antarpekan, mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan, serta menilai kemampuan rumah tangga memperoleh bahan pangan pokok. Operasi Pasar atau GPM dapat dipertimbangkan secara terarah apabila verifikasi menunjukkan harga tinggi dan/atau pasokan terbatas. Penentuan lokasi dan komoditas harus berdasarkan hasil pemantauan, bukan perkiraan.
2. Ketersediaan pasokan. OPD teknis perlu menyusun informasi stok dan kebutuhan komoditas prioritas, termasuk cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, dan komoditas lain yang muncul dalam data IPH. Penguatan pasokan lokal melalui pertanian, peternakan, perikanan, dan kerja sama antardaerah perlu diarahkan untuk mengurangi kerentanan terhadap keterlambatan pasokan dari luar wilayah.
3. Kelancaran distribusi. Mengingat karakter Kabupaten Kepulauan Aru sebagai wilayah kepulauan, pemantauan perlu mencatat jadwal kapal, asal barang, biaya angkut, lama
5.

pengiriman, serta hambatan cuaca dan bongkar muat. Jika ditemukan hambatan, TPID perlu memfasilitasi koordinasi dengan distributor, pelaku transportasi, pelabuhan, dan pemerintah daerah pemasok untuk menjaga kesinambungan pasokan.

4. Komunikasi efektif. Informasi harga, stok, jadwal pasokan, dan hasil sidak perlu dibagikan secara rutin antar-OPD dan kepada masyarakat melalui kanal resmi. Komunikasi yang cepat dan akurat membantu mencegah kepanikan belanja, penimbunan, serta informasi harga yang tidak sesuai kondisi pasar.

   Stabilitas harga mendukung daya beli karena mengurangi risiko berkurangnya jumlah barang yang dapat dibeli rumah tangga dengan pendapatan yang sama. Namun, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari penurunan IPH saja. Evaluasi perlu melihat keterjangkauan harga pangan, ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta kesinambungan pendapatan masyarakat.

   Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru, kebijakan pengendalian inflasi perlu berjalan seiring dengan penguatan produksi dan usaha lokal. Perangkat daerah terkait dapat mendorong peningkatan produksi komoditas pangan yang sesuai potensi wilayah, penguatan kelompok tani/nelayan/peternak, pengolahan hasil, akses pasar, kemitraan dengan pedagang dan pelaku usaha, serta perbaikan rantai pasok. Pengembangan komoditas lokal perlu disesuaikan dengan data potensi, musim, kapasitas produksi, dan kelayakan pasar; bukan sekadar target tanpa dukungan sarana dan pembeli.

   Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya menahan kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pasokan lokal, menjaga pendapatan produsen, membuka kesempatan usaha dan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam daerah. Dampaknya perlu diukur melalui indikator yang tersedia dan diverifikasi secara berkala.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Prioritas Kebijakan Jangka Pendek**
   - Melaksanakan Sidak Pasar secara terarah terhadap komoditas yang tercatat dalam pemantauan IPH, terutama cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, tempe, dan daging ayam ras sesuai perkembangan harga aktual. Sidak mencatat harga beli, harga jual, stok, asal barang, dan biaya distribusi.
   - Menetapkan mekanisme pemantauan harga dan stok secara mingguan pada pasar/penjual sampel yang konsisten. Hasilnya disampaikan kepada TPID untuk menentukan apakah diperlukan koordinasi pasokan, Operasi Pasar, atau GPM.
   - Menyiapkan Operasi Pasar dan/atau GPM sebagai opsi intervensi pada periode berikutnya apabila data lapangan membuktikan kenaikan harga yang membebani masyarakat atau kekurangan pasokan. Kegiatan tersebut harus dicatat sebagai rencana sampai benar-benar dilaksanakan.
   - Meminta OPD teknis dan distributor menyampaikan informasi stok, kebutuhan, pasokan masuk, jadwal pengiriman, serta potensi gangguan transportasi laut agar antisipasi dapat dilakukan sebelum terjadi kelangkaan.

1. **Penguatan Pasokan dan Distribusi Jangka Menengah**
   - Menyusun neraca sederhana komoditas pangan prioritas yang memuat perkiraan kebutuhan, produksi lokal, pasokan dari luar daerah, stok, dan pola musim. Neraca

diperbarui secara berkala sebagai dasar kerja sama pasokan.

- Mengembangkan kerja sama antardaerah dan kemitraan antara kelompok produsen, pedagang pengumpul, distributor, serta pelaku transportasi untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi biaya distribusi yang tidak efisien.
- Mengidentifikasi komoditas yang layak ditingkatkan produksinya di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan kesesuaian lahan/perairan, musim, ketersediaan sarana produksi, kapasitas pelaku usaha, dan kepastian pasar.

1. **Penguatan Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal**

- Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan melalui pendampingan teknis, akses sarana produksi, pengolahan pascapanen, penyimpanan, dan penguatan kelembagaan kelompok usaha.
- Memperluas akses pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan pasar, toko, usaha kuliner, koperasi, dan pengadaan pemerintah sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan memperpendek rantai pasok sekaligus memperluas pendapatan produsen lokal.
- Mendorong pengolahan hasil lokal agar memiliki nilai tambah dan masa simpan lebih baik, dengan memperhatikan kelayakan usaha, standar mutu, kemasan, kontinuitas bahan baku, dan permintaan pasar.
- Memastikan intervensi harga tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan produsen. Harga yang terjangkau bagi konsumen perlu diupayakan tanpa menekan harga jual produsen lokal secara tidak wajar.

1. **Indikator Pemantauan dan Evaluasi**

- Perkembangan IPH mingguan dan daftar komoditas penyumbang, dengan kelengkapan data setiap minggu.
- Perubahan harga eceran komoditas prioritas pada pasar pemantauan, termasuk selisih harga antarwilayah/pulau jika data tersedia.
- Ketersediaan stok, volume pasokan masuk, asal pasokan, frekuensi pengiriman, dan biaya angkut.
- Jumlah dan hasil Sidak Pasar, rekomendasi TPID, serta realisasi tindak lanjut yang dapat dibuktikan.
- Jika Operasi Pasar/GPM dilaksanakan: lokasi, tanggal, komoditas, volume, harga penjualan, jumlah penerima/manfaat, dan perubahan harga sebelum-sesudah kegiatan.
- Indikator ekonomi lokal yang tersedia, seperti volume produksi/penjualan komoditas lokal, jumlah kelompok usaha yang terlibat, penyerapan tenaga kerja, dan nilai transaksi pemasaran. Indikator ini perlu dihimpun oleh OPD teknis; laporan ini belum memuat angka capaian tersebut.

1	Memperkuat pemantauan harga dan stok komoditas prioritas, terutama bawang merah, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan tepung terigu.	Bagian Perekonomian/TPID bersama OPD teknis dan petugas pemantau pasar.	Rekap harga, stok, lokasi pasar, dan sumber pasokan yang diperbarui secara berkala.
2	Melengkapi data IPH dan harga mingguan, termasuk memverifikasi ketersediaan data Minggu III September.	Bagian Perekonomian/TPID dan BPS.	Data antarpekan yang konsisten dan dapat diverifikasi.
3	Mengidentifikasi penyebab perubahan harga melalui pemeriksaan pasokan, biaya angkut, dan kelancaran distribusi.	OPD teknis, pelaku usaha, distributor, dan penyedia jasa transportasi.	Catatan analisis penyebab perubahan harga dan hambatan distribusi.

4	Menindaklanjuti temuan barang kedaluwarsa/tidak layak edar dalam Operasi Pasar melalui pengawasan mutu dan koordinasi dengan instansi berwenang.	TPID dan OPD pelaksana sesuai kewenangan.	Catatan pemeriksaan, tindak lanjut temuan, dan dokumentasi pengawasan barang beredar.
5	Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan benih dan sarana produksi serta memperkuat koordinasi pasokan antardaerah.	OPD terkait pertanian/ketahanan pangan, TPID, dan mitra terkait.	Rencana tindak lanjut untuk memperkuat ketersediaan komoditas pangan prioritas.
6	Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh upaya pengendalian inflasi secara berkala.	Bagian Perekonomian/TPID dan OPD pelaksana.	Laporan yang memuat waktu, lokasi, komoditas, pelaksana, hasil, dan dokumen pendukung.